

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
Intisari	x
Abstract	xi
 BAB I P E N D A H U L U A N	 1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kerangka Teori	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Implementasi Kebijakan	13
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah	20
G. Definisi Konsep.....	34
H. Definisi Operasional.....	35
I. Metodologi Penelitian.....	37
 BAB II D E S K R I P S I W I L A Y A H P E N E L I T I A N	 45
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Barat	45
B. Sumberdaya Air Bawah Tanah Di Jawa Barat	47
C. Karakteristik Hidrogeologi dan Kondisi Air Bawah Tanah Di Cekungan Bandung	53
D. Pengelolaan Air Bawah Tanah Sebelum Implementasi UU No. 22/99 dan PP No. 25/2000	56
E. Deskripsi Kewenangan Provinsi Dalam Pengelolaan Air Bawah Tanah Berikut Pajaknya Di Era Otonomi Daerah	59



BAB III	KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN ORGANISASI PENGELOLANYA DI JAWA BARAT	62
A.	Tinjauan terhadap Pengelolaan Air Bawah Tanah di Indonesia	62
B.	Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah	69
C.	Organisasi Dinas Pengelola Air Bawah Tanah dan Dinas Pengelola Pajaknya Di Provinsi Jawa Barat	81
1.	Dinas Pertambangan dan Energi	81
2.	Dinas Pendapatan Daerah	91
BAB IV	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH	97
A.	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah	98
1.	Bentuk Pemberian Dukungan Ke Kabupaten/Kota .	98
2.	Pemberian Fasilitas Perizinan Ke Kabupaten/Kota	123
B.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah	144
C.	Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	170
D.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	195
BAB V	ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH : PERSPEKTIF PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR DAN LINGKUNGAN DI ERA OTONOMI DAERAH	217
A.	Analisis Terhadap Kebijakan Pusat Dalam Pengelolaan Air Bawah Tanah	217

B.	Implikasi Implementasi Kebijakan Terhadap Kab/Kota	
	: Analisis Terhadap Dinamika Hubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota Di Era Otonomi Daerah	228
C.	Implikasi Implementasi Kebijakan Terhadap Pengguna Air (Masyarakat) : Analisis Terhadap Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (Negara Vs Rakyat)	232
D.	Analisis Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah Terhadap Sumberdaya Air Dan Lingkungan	238
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	248
A.	Kesimpulan	248
B.	Perspektif Pengelolaan Sumberdaya Air Dan Lingkungan Di Era Otonomi Daerah : Sebuah Generalisasi	258
C.	Saran	262
DAFTAR PUSTAKA		264
LAMPIRAN		267

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Faktor-faktor dan Indikator yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah di Jawa Barat	36
Tabel II.1 Ketersediaan Air Bawah Tanah Pada Setiap Cekungan Air Bawah Tanah Di Jawa Barat	51
Tabel II.2 Data Perkembangan Pengambilan Air Bawah Tanah Di Jawa Barat Periode 1998/1999 – 2002	52
Tabel II.3 Data Pengambilan Air Bawah Tanah Di Cekungan Bandung Tahun 2002	55
Tabel II.4 Tarif Pajak Air Bawah Tanah yang Berlaku Di Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Pada Masa Berlakunya UU No. 18 Tahun 1997	58
Tabel III.1 Evolusi Regulasi Pengelolaan Air Bawah Tanah di Indonesia .	64
Tabel III.2 Jumlah Pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Berdasarkan Status	87
Tabel III.3 Jumlah Pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	87
Tabel III.4 Jumlah Pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Formal	88
Tabel III.5 Jumlah Sarana Dan Prasara Yang Tersedia	88
Tabel III.6 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Status	95
Tabel III.7 Jumlah Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	95
Tabel IV.1 Rincian Jenis Kegiatan yang Ditujukan Untuk Pemberian Dukungan dalam Pengelolaan Air Bawah Tanah	109



Tabel IV.2	Respon dari Kabupaten/Kota terhadap Manfaat Kebijakan Pengelolaan Air Bawah Tanah dalam Bentuk Pemberian Dukungan	111
Tabel IV.3	Stuktur Organisasi Instansi Pengelola Air Bawah Tanah di Kabupaten/Kota yang Berada di Wilayah Cekungan Bandung	114
Tabel IV.4	Alokasi Anggaran Untuk Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat TA. 2001 s/d 2002	122
Tabel IV.5	Rekapitulasi Persyaratan Teknis untuk wilayah Cekungan Bandung yang Diterbitkan pada Tahun 2002	127
Tabel IV.6	Rincian Jenis Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Fasilitas Perizinan	143
Tabel IV.7	Tingkat Pengetahuan Terhadap Karakteristik Air Bawah Tanah	166
Tabel IV.8	Tingkat Pengetahuan Terhadap Cekungan Air Bawah Tanah ..	167
Tabel IV.9	Tingkat Pengetahuan Terhadap Konsekuensi Pengambilan Air Bawah Tanah terhadap Lingkungan	167
Tabel IV.10	Tingkat Fleksibilitas Masyarakat Terhadap Persyaratan Teknis Dalam Prosedur Perizinan	168
Tabel IV.11	Tingkat Respon Masyarakat Terhadap Manfaat Persyaratan Teknis	169
Tabel IV.12	Perbandingan Antara Hasil Perhitungan NPA dengan Realisasi Pajak Air Bawah Tanah Pada Tahun 2002	176
Tabel IV.13	Contoh Distribusi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air di Kabupaten/Kota yang Berada di Wilayah Cekungan Bandung Tahun 2002	178
Tabel IV.14	Contoh Perbandingan Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota dari Pajak Air Bawah Tanah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah	179
Tabel IV.15	Perbandingan Realisasi Pajak Air terhadap PAD di Jawa Barat antara TA. 1993/1994 s/d TA. 2002	180

Tabel IV.16	Tingkat kesadaran terhadap kewajiban pembayaran pajak air bawah tanah	186
Tabel IV.17	Tingkat perubahan terhadap tatacara dan perhitungan pajak air	187
Tabel IV.18	Tingkat Pengetahuan Terhadap Tatacara Perhitungan Pajak Atas Dasar NPA	187
Tabel IV.19	Dampak Perubahan Perhitungan Pajak Dengan NPA Terhadap Jumlah Pajak Yang Dibayar	187
Tabel IV.20	Tanggapan terhadap prosedur dan kualitas pelayanan pajak dibandingkan pemungutan pajak sebelumnya oleh Kabupaten/Kota	188
Tabel IV. 21	Jumlah Personil, Waktu Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Sarana dan Prasarana di Balai Konservasi Wilayah III Tasikmalaya dan UPPD di Wilayah Cekungan Bandung	193
Tabel V.1	Tanggapan terhadap Waktu yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pengurusan Izin Baru	233
Tabel V.2	Tanggapan terhadap Waktu yang Dibutuhkan untuk Melakukan Pengurusan Izin Baru Sesudah Dilimpahkan ke Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Pengurusan ke Provinsi	234
Tabel V.3	Tanggapan terhadap Biaya yang Dibutuhkan untuk Menyelesaikan Pengurusan Izin Sesudah Dilimpahkan ke Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Pengurusan ke Provinsi	235
Tabel V.4	Tanggapan terhadap Prosedur yang Ditempuh Dalam Pengurusan Perizinan	236
Tabel V.5	Tanggapan terhadap Prosedur yang Ditempuh dalam Pengurusan Izin Sesudah Dilimpahkan ke Kabupaten/Kota Dibandingkan dengan Pengurusan ke Provinsi	236
Tabel V.6	Perbandingan Masyarakat yang Memiliki Perizinan (SIPA) dengn Non SIPA di Wilayah Cekungan Bandung	237
Tabel V.7	Nilai Indeks Konservasi Air Bawah Tanah	241



Tabel V.8	Penduduk di Wilayah Cekungan Bandung Tahun 2001	242
Tabel V.9	Kedudukan Muka airtanah akuifer dangkal (daerah padat industri)	244
Tabel V.10	Kedudukan Muka airtanah akuifer tengah (daerah padat industri)	245